

Judul : Sagu pengganti beras, Jadi barang mahal kalau terlambat
Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Sagu Pengganti Beras Jadi Barang Mahal Kalau Terlambat

ANGGOTA Komisi X DPR Robert J Kardinal mendukung upaya Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong sagu sebagai komoditi pangan pengganti beras. Aksi-aksi nyata di lapangan kudu dilakukan agar substitusi pangan ini berjalan dengan baik sebelum terlambat.

"Karena faktanya, tidak ada kebijakan nyata dari Pemerintah mendorong sagu ini sebagai pangan alternatif pengganti beras. Hanya sekadar *statement*, tapi tidak sesuai dengan tindakan," tegas Kardinal di Jakarta, kemarin.

Politisi asal Papua Barat ini menyayangkan komoditi sagu malah menjadi komoditi politik untuk menekan harga beras yang mulai tinggi. Tapi tidak ada solusi yang benar-benar menjawab masalah ini.

Malah pemerintah menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk membangun *Food Estate*. "Pertanyaannya sekarang, apa ada *Food Estate* itu yang berhasil? Sekarang pemerintah teriak kalau beras mahal, suruh makan sagu," ujarnya.

Kardinal menjelaskan, Papua dapat menjadi solusi dalam mengatasi ancaman krisis pangan saat ini. Sebab, dari seluruh potensi sagu yang ada, Papua memiliki 5,2 juta hektare lahan yang dapat dioptimalkan mendorong substitusi pangan ini. "Dengan 1,5 juta hektare saja itu sudah cukup untuk menghindari Indonesia dari potensi krisis pangan," jelasnya.

Dia mendorong agar program *Food Estate* ini bisa menasar potensi sagu yang luar biasa di Papua ini. Toh, pabrik untuk pengolahan sagu pun di kawasan Indonesia Timur ini pun sudah tersedia. Pabrik tersebut merupakan milik Perum Perhutani di Sorong Selatan, Papua Barat. Sayangnya pabrik ini mangkrak karena keterbatasan anggaran.

Politisi Fraksi Golkar ini mendorong agar alokasi anggaran terhadap Program *Food Estate* yang dianggap tidak berhasil, bisa dialihkan untuk program pengem-

banagan sagu di kawasan Papua. Ini merupakan solusi mengatasi tingginya harga dan mulai turunnya produksi beras di tingkat petani.

"Potensi sagu ini sangat besar, cuma tidak didukung oleh pemerintah. Saya khawatir jika terlambat, sagu ini ikutan mahal bahkan bisa lebih mahal dari beras," tambah dia.

Terpisah, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Rusnadi Padjung mengingatkan pentingnya diversifikasi melalui pengembangan pangan lokal pengganti beras. Selain meningkatkan keanekaragaman produksi dan konsumsi pangan lokal yang bergizi dan aman untuk dikonsumsi, juga sebagai bentuk antisipasi ancaman krisis pangan global.

"Selama ini beras menjadi sumber pangan yang dominan. Sementara, Indonesia ini kaya akan sumber pangan sebagai alternatif mengurangi ketergantungan terhadap beras," kata Rusnadi.

Rusnadi melanjutkan, upaya pengembangan sumber pangan lokal berbasis potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan akan memperkuat capaian swasembada beras. Dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan potensi sumber pangan lokal, sangat memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. "Ada sagu, ubi kayu, ubi jalar, pisang," ungkapnya.

Rusnadi menuturkan, salah satu contoh sumber pangan yang potensial untuk diakselerasi sebagai pengganti beras adalah sagu. Sagu yang berasal dari Sentani Papua misalnya, mengandung karbohidrat mencapai 56 sampai 87 persen, sementara kandungan pati di antara 81 sampai 84 persen.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri menjelaskan, Kementan telah melakukan mitigasi untuk menghadapi ancaman krisis pangan global. Di antaranya, memperkuat potensi pangan berbasis sumber daya lokal. Selain upaya menjaga tingkat produksi beras agar tetap swasembada. ■ KAL